

**FORMAT USULAN RENCANA KEGIATAN
PROPOSAL DAK TA. 2017**

FORMAT SURAT PENGANTAR

KOP KEPALA DAERAH

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Tempat, tanggal

Yth.
di

Yang bertanda tangan di bawah ini, Gubernur/Bupati/Walikota, bersama ini mengusulkan kegiatan yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah Provinsi/Kabupaten/KotaTahun Anggaran 2017. Usulan kegiatan tersebut telah kami rinci menurut bidang/subbidang/subjenis DAK sesuai dengan format dan data teknis yang ditentukan, dengan kebutuhan dana sebagai berikut:

1.	DAK Reguler	Rp xxxxx
2.	DAK Infrastruktur Publik Daerah	Rp xxxxx
3.	DAK Afirmasi	Rp xxxxx

JUMLAH

Rp xxxxxx

Terbilang jumlah DAK sebesar
..... (dalam huruf)

Usulan DAK tersebut, akan kami laksanakan dengan kesungguhan dan tanggung jawab sesuai jenis kegiatan, satuan, volume dan lokasi kegiatan yang kami usulkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Gubernur/Bupati/Walikota

Tandatangan asli dan stempel basah
Nama

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP KEPALA DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Jabatan :

Alamat Kantor :

.....

No. Telepon/Email :

MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan terkait Proposal DAK Bidang Infrastruktur (Subbidang Jalan, Subbidang Irigasi, Subbidang Air Minum, Subbidang Sanitasi, dan Subbidang Perumahan) TA. 2017 beserta Data Pendukungnya adalah benar.
2. Segala konsekuensi yang muncul di kemudian hari akibat dari ketidakbenaran data dan informasi yang diberikan akan menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenarnya.

....., 2016

Yang Membuat Pernyataan,

TTD
Bermaterai 6000

(NAMA JELAS)

FORMAT REKAPITULASI USULAN DAK

**REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
TAHUN ANGGARAN**

No.	Jenis/Bidang/Subjenis	Subbidang	Jumlah
I	DAK Reguler		
	A. Bidang	1. Subbidang..... 2. Subbidang.....	Rp - Rp -
	Jumlah Bidang		Rp -
	B. Bidang	1. Subbidang..... 2. Subbidang.....	Rp - Rp -
	Jumlah Bidang		Rp -
	Total DAK Reguler		<u>Rp -</u>
II	DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD)		
	A. Bidang	1. Subbidang..... 2. Subbidang.....	Rp - Rp -
	Jumlah Bidang		Rp -
	B. Bidang	1. Subbidang..... 2. Subbidang.....	Rp - Rp -
	Jumlah Bidang		Rp -
	Total DAK IPD		<u>Rp -</u>
III	DAK Afirmasi		
	A. Subjenis		Rp -
	B. Subjenis		Rp -
Total DAK Afirmasi		<u>Rp -</u>	
Total Usulan DAK Terbilang :.....			Rp -

Nama Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun
Gubernur/Bupati/Walikota

Tandatangan asli dan stempel basah
Nama

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN
DAK REGULER TA. 2017
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
SUBBIDANG IRIGASI



NO.	PROGRAM DALAM RPJMD/ RKPD	KEGIATAN	TARGET OUTPUT				TARGET OUTCOME				RUPIAH			
			SATUAN	VOLUME			BIAYA/ SATUAN 2017	SATUAN	VOLUME			LOKASI	DAK	APBD NON DAK
				2017	2018	2019			2017	2018	2019			
A. Subbidang Irigasi														
A.1 Provinsi														
	1.	Rehabilitasi jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi	M/Buah					Ha						
	2.	Peningkatan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi	M/Buah					Ha						
	3.	Pembangunan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi	M/Buah					Ha						
A.2 Kabupaten/Kota														
	1.	Rehabilitasi jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	M/Buah					Ha						
	2.	Peningkatan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	M/Buah					Ha						
	3.	Pembangunan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Kab/Kota	M/Buah					Ha						

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN
DAK IPD TA. 2017
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
SUBBIDANG IRIGASI



NO.	PROGRAM DALAM RPJMD/ RKPD	KEGIATAN	TARGET OUTPUT				TARGET OUTCOME				RUPIAH			
			SATUAN	VOLUME			BIAYA/ SATUAN 2017	SATUAN	VOLUME			LOKASI	DAK	APBD NON DAK
				2017	2018	2019			2017	2018	2019			
A.	Subbidang Irigasi													
	A.2 Kabupaten/Kota													
	1.	Rehabilitasi jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	M/Buah					Ha						
	2.	Peningkatan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	M/Buah					Ha						
	3.	Pembangunan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Kab/Kota	M/Buah					Ha						

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN
DAK AFIRMASI TA. 2017
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
SUBBIDANG IRIGASI



NO.	PROGRAM DALAM RPJMD/ RKPD	KEGIATAN	TARGET OUTPUT				TARGET OUTCOME				RUPIAH			
			SATUAN	VOLUME			BIAYA/ SATUAN 2017	SATUAN	VOLUME			LOKASI	DAK	APBD NON DAK
				2017	2018	2019			2017	2018	2019			
A.	Subbidang Irigasi													
	A.2 Kabupaten/Kota													
	1.	Rehabilitasi jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	M/Buah					Ha						
	2.	Peningkatan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	M/Buah					Ha						
	3.	Pembangunan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Kab/Kota	M/Buah					Ha						

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN
DAK REGULER TA. 2017
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
SUBBIDANG JALAN



NO.	PROGRAM DALAM RPJMD/RKPD	KEGIATAN	TARGET OUTPUT							
			SATUAN	VOLUME			BIAYA/ SATUAN 2017	LOKASI	RUPIAH	
				2017	2018	2019			DAK	APBD NON DAK
A.	Subbidang Jalan									
	A.1 Provinsi									
	1.	Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan Provinsi	Km/M							
	2.	Peningkatan jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan Provinsi	Km/M							
	3.	Pembangunan jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan Provinsi	Km/M							
	A.2 Kabupaten/Kota									
	1.	Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan Kabupaten/Kota	Km/M							
	2.	Peningkatan jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan Kabupaten/Kota	Km/M							
	3.	Pembangunan jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan Kab/Kota	Km/M							

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN
DAK IPD TA. 2017
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
SUBBIDANG JALAN



NO.	PROGRAM DALAM RPJMD/RKPD	KEGIATAN	TARGET OUTPUT							
			SATUAN	VOLUME			BIAYA/ SATUAN 2017	LOKASI	RUPIAH	
				2017	2018	2019			DAK	APBD NON DAK
A.	Subbidang Jalan									
	A.1 Kabupaten/Kota									
		1. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan Kabupaten/Kota	Km/M							
		2. Peningkatan jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan Kabupaten/Kota	Km/M							
		3. Pembangunan jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan Kab/Kota	Km/M							

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN
DAK AFIRMASI TA. 2017
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
SUBBIDANG JALAN



NO.	PROGRAM DALAM RPJMD/RKPD	KEGIATAN	TARGET OUTPUT							
			SATUAN	VOLUME			BIAYA/ SATUAN 2017	LOKASI	RUPIAH	
				2017	2018	2019			DAK	APBD NON DAK
A.	Subbidang Jalan									
	A.2 Kabupaten/Kota									
		1. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan Kabupaten/Kota	Km/M							
		2. Peningkatan jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan Kabupaten/Kota	Km/M							
		3. Pembangunan jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan Kab/Kota	Km/M							

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN
DAK REGULER TA. 2017
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
SUBBIDANG AIR MINUM



NO.	PROGRA M DALAM RPJMD/ RKPD	KEGIATAN	TARGET OUTPUT				TARGET OUTCOME			DETAIL LOKASI (Dusun/Kampung, Desa, Kecamatan, Kab/Kota)	RUPIAH			
			SATUAN	VOLUME			BIAYA/ SATUAN 2017	SATUAN	VOLUME			DAK	APBD NON DAK	
				2017	2018	2019			2017		2018			2019
Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum														
		1. Pengembangan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier yang menjadi bagian dari kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota melalui DDUB mendukung kegiatan pengembangan SPAM yang sebagian dibiayai oleh sumber dana APBN	Liter/ detik					SR						
		2. Perluasan dan peningkatan Sambungan Rumah (SR) murah perpipaan bagi masyarakat miskin perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan.	Liter/ detik					SR						
		3. Pemasangan master meter untuk masyarakat miskin perkotaan khususnya yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan	Liter/ detik					SR						
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum														
		4. Peningkatan kapasitas sistem terpasang untuk SPAM yang sudah mencapai kapasitas produksi maksimal, dapat melakukan penambahan kapasitas sistem terpasang melalui pembangunan intake dan komponen SPAM lainnya sampai SR.	Liter/ detik					SR						

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN
DAK IPD TA. 2017
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
SUBBIDANG AIR MINUM



NO.	PROGRA M DALAM RPJMD/ RKPD	KEGIATAN	TARGET OUTPUT				TARGET OUTCOME			DETAIL LOKASI (Dusun/Kampung, Desa, Kecamatan, Kab/Kota)	RUPIAH			
			SATUAN	VOLUME			BIAYA/ SATUAN 2017	SATUAN	VOLUME			DAK	APBD NON DAK	
				2017	2018	2019			2017		2018			2019
Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum														
		1. Pengembangan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier yang menjadi bagian dari kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota melalui DDUB mendukung kegiatan pengembangan SPAM yang sebagian dibiayai oleh sumber dana APBN	Liter/ detik					SR						
		2. Perluasan dan peningkatan Sambungan Rumah (SR) murah perpipaan bagi masyarakat miskin perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan.	Liter/ detik					SR						
		3. Pemasangan master meter untuk masyarakat miskin perkotaan khususnya yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan	Liter/ detik					SR						
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum														
		4. Peningkatan kapasitas sistem terpasang untuk SPAM yang sudah mencapai kapasitas produksi maksimal, dapat melakukan penambahan kapasitas sistem terpasang melalui pembangunan intake dan komponen SPAM lainnya sampai SR.	Liter/ detik					SR						

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN
DAK AFIRMASI TA. 2017
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
SUBBIDANG AIR MINUM



NO.	PROGRA M DALAM RPJMD/ RKPD	KEGIATAN	TARGET OUTPUT				TARGET OUTCOME				DETAIL LOKASI (Dusun/Kampung, Desa, Kecamatan, Kab/Kota)	RUPIAH			
			SATUAN	VOLUME			BIAYA/ SATUAN 2017	SATUAN	VOLUME			DAK	NON DAK		
				2017	2018	2019			2017	2018				2019	
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum															
		1.	Pembangunan SPAM Perdesaan pada desa-desa rawan air, terpencil dan tertinggal, serta SPAM kawasan khusus di kawasan pulau-pulau kecil dan terluar dan perbatasan	Liter/ detik					SR						

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN
DAK REGULER TA. 2017
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
SUBBIDANG SANITASI



NO.	KEGIATAN	TARGET								Tercantum dalam SSK/ RPI2JM (Ya/Tidak)	DANA	LOKASI		
		OUTPUT					OUTCOME							
		2017	2018	2019	SATUAN	BIAYA/ SATUAN 2017	2017	2018	2019				SATUAN	
B.	Sub Bidang Sanitasi											Rp.	-	
1	IPAL komunal (dengan jaringan perpipaan berbasis masyarakat melayani minimal 50 KK)				Unit					KK		Rp.	-	
2	Kombinasi IPAL komunal dengan MCK (melayani minimal 50 KK, minimal 25 SR)				Unit					KK		Rp.	-	
3	Pengembangan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (pada IPAL Sanimas yang sudah ada, untuk melayani minimal 50 KK)				Unit					KK		Rp.	-	
4	Tangki Septik Komunal (dengan media bakteri, 5 - 10 KK)				Unit					KK		Rp.	-	
5	Perpipaan dan Tangki Septik Individual media bakteri (minimal satu lokasi 20 unit. Usulan prasarana ini khusus bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT yang sudah beroperasi, dan berkomitmen mengeluarkan perda/perbup/perwali tentang program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) pada tahun berjalan)				Unit					KK		Rp.	-	

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN
DAK IPD TA. 2017
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
SUBBIDANG SANITASI



NO.	KEGIATAN	TARGET								Tercantum dalam SSK/ RPI2JM (Ya/Tidak)	DANA	LOKASI	
		OUTPUT					OUTCOME						
		2017	2018	2019	SATUAN	BIAYA/ SATUAN 2017	2017	2018	2019				SATUAN
B.	Sub Bidang Sanitasi										Rp.	-	
	1. IPAL Skala kawasan (minimal 200 SR melayani minimal 200 KK)				Unit					KK	Rp.	-	
	2. IPAL Komunal (minimal 50 SR, melayani minimal 50 KK)				Unit					KK	Rp.	-	
	3. Toilet Umum				Unit					KK	Rp.	-	

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN
DAK AFIRMASI TA. 2017
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
SUBBIDANG SANITASI



NO.	KEGIATAN	TARGET								Tercantum dalam SSK/ RPI2JM (Ya/Tidak)	DANA	LOKASI	
		OUTPUT				OUTCOME							
		2017	2018	2019	SATUAN	BIAYA/ SATUAN 2017	2017	2018	2019				SATUAN
B.	Sub Bidang Sanitasi											Rp. -	
1	IPAL komunal (dengan jaringan perpipaan berbasis masyarakat melayani minimal 50 KK)				Unit					KK		Rp. -	
2	Kombinasi IPAL komunal dengan MCK (melayani minimal 50 KK, minimal 25 SR)				Unit					KK		Rp. -	
3	Pengembangan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (pada IPAL Sanimas yang sudah ada, untuk melayani minimal 50 KK)				Unit					KK		Rp. -	
4	Tangki Septik Komunal (dengan media bakteri, 5 - 10 KK)				Unit					KK		Rp. -	
5	Perpipaan dan Tangki Septik Individual media bakteri (minimal satu lokasi 20 unit. Usulan prasarana ini khusus bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT yang sudah beroperasi, dan berkomitmen mengeluarkan perda/perbup/perwali tentang program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) pada tahun berjalan)				Unit					KK		Rp. -	
6	MCK Plus (Maksimal 4 Pintu)				Unit					KK		Rp. -	

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN
DAK REGULER TA. 2017
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
SUBBIDANG PERUMAHAN



No	PROGRAM DALAM RPJMD/ RKPD	KEGIATAN	TARGET OUTPUT					TARGET OUTCOME				LOKASI	RUPIAH	
			SATU AN	VOLUME			BIAYA/ SATUAN 2017	VOLUME			SATUA N		DAK	APBD NON DAK
				2017	2018	2019		2017	2018	2019				
Sub Bidang Perumahan														
		1 Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Unit								KK	Desa/ Kelurahan		
		2 Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Unit								KK	Desa/ Kelurahan		

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN
DAK AFIRMASI TA. 2017
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
SUBBIDANG PERUMAHAN



No	PROGRAM DALAM RPJMD/ RKPD	KEGIATAN	TARGET OUTPUT					TARGET OUTCOME				LOKASI	RUPIAH	
			SATUAN	VOLUME			BIAYA/ SATUAN 2017	VOLUME			SATUAN		DAK	APBD NON DAK
				2017	2018	2019		2017	2018	2019				
Sub Bidang Perumahan														
		1 Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Unit								KK	Desa/ Kelurahan		
		2 Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Unit								KK	Desa/ Kelurahan		

**DATA PENDUKUNG
DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TA. 2017**

DATA PENDUKUNG DAK TA. 2017

PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

SUBBIDANG IRIGASI



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO.	DATA TEKNIS / JENIS DATA	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Luas Irigasi Kewenangan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015;	Ha	Merupakan total luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota
2	Kondisi jaringan irigasi - Rusak sedang - Rusak Berat	Ha Ha	Merupakan total luas daerah irigasi dalam kondisi rusak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota
3	Indeks Pertanaman (Realisasi); - IP Padi - IP Total Rencana IP 2017 - IP Padi - IP Total	% % % %	Merupakan perbandingan luas tanam padi dalam satu tahun di provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total luas tanam padi provinsi/kabupaten/kota dalam satu tahun
4	Kepedulian; - Dana OP - Perda Irigasi - RP2I / RPIJM - Komisi Irigasi - Tim Koordinasi	Rupiah Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak	Terdiri dari Pemenuhan dana O&P; Perda Irigasi; RPIJM (Usulan DAK); Komisi Irigasi; dan Tim Koordinasi.
5	Pelaporan - Laporan Triwulanan tertulis tahun berjalan - Laporan e-Mon terakhir - Isian Form RTI (aplikasi e-Mon) - Progres status terakhir: - Fisik - Keuangan	Ada/Tidak Tanggal Ada/Tidak % %	Merupakan perbandingan nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Irigasi TA. 2015 pada provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Irigasi TA. 2015 secara nasional.

DATA PENDUKUNG DAK TA. 2017

PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

SUBBIDANG JALAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO.	DATA TEKNIS/ JENIS DATA	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Panjang jalan kabupaten/kota (km);	Km	Merupakan total panjang jalan Status Kabupaten /kota berdasarkan SK Bupati/Walikota
2	Panjang jalan provinsi (km);	Km	Merupakan total panjang jalan Status Provinsi berdasarkan SK Gubernur
4	Panjang jalan kabupaten/kota dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat (km);	Km	Merupakan total panjang jalan Status Kabupaten/Kota dengan kriteria rusak ringan dan rusak berat sesuai dengan Juknis DAK
5	Panjang jalan provinsi dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat (km);	Km	Merupakan total panjang jalan Status Provinsi dengan kriteria rusak ringan dan rusak berat sesuai dengan Juknis DAK
6	Kinerja jalan;	%	Merupakan persentase peningkatan kondisi mantap dari tahun anggaran sebelumnya.
7	Prosentase dana APBD untuk menangani Jalan Provinsi / Kabupaten di luar DAK	%	Merupakan kontribusi pendanaan APBD di luar DAK untuk sektor jalan pada provinsi/kabupaten/kota
8	Karakteristik Kewilayahan: yaitu wilayah prioritas seperti daerah tertinggal, perbatasan, KSN, PKN, PKW, PKSN, KSPN, dan KSCT;	Ya / Tidak		Merupakan daerah dengan kategori daerah tertinggal, perbatasan, KSN, PKN, PKW, PKSN, KSPN, dan KSCT
9	Tingkat konektivitas dan kebutuhan masyarakat terhadap aksesibilitas ke Pelayanan Dasar	%		Merupakan rasio panjang jalan eksisting yang sudah terbangun (poin 1 atau 2) terhadap rencana panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan
10	Pelaporan	Laporan/ e-Mon	Merupakan nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Jalan TA. 2015 pada provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan (Data dari Biro PAKLN)
11	Alokasi Dana APBD untuk pemeliharaan rutin	%	Merupakan alokasi Dana APBD untuk pemeliharaan rutin jalan
12	Tingkat mobilitas (Panjang Jalan / 1000 Penduduk)	%	Merupakan perbandingan antara jumlah panjang jalan terhadap 1000 penduduk
13	Tingkat Aksesibilitas (Panjang Jalan / Luas Wilayah)	%	Merupakan perbandingan antara jumlah panjang jalan terhadap luas wilayah
14	Jumlah Penduduk ([^] 1000 Penduduk)	1000 Penduduk	Merupakan jumlah penduduk dalam suatu provinsi/kabupaten/kota
15	Luasan wilayah yang ditangani jalan (A)	Km ²	Merupakan luas wilayah suatu provinsi/kabupaten/kota

TABEL KELENGKAPAN PROPOSAL DAK SUBBIDANG JALAN



LIST KELENGKAPAN PROPOSAL:

- Daftar lampiran usulan ruas jalan yang akan ditangani
- Data teknis yang telah terverifikasi
- Stripmap / Grafik Gitar rencana penanganan TA 2017
- Rencana Strategis (Rencana Penganan) TA 2017 – 2019

Format Lampiran Usulan Ruas Jalan Yang Akan Ditangani

NO	NAMA RUAS	USULAN BIAYA (Rp)	PANJANG RUAS (Km/M)	KRITERIA KESIAPAN		DUKUNGAN PRIORITAS*
				DESAIN PERENCANAAN	KETERSEDIAAN LAHAN	

*Keterangan Dukungan Prioritas:

- Mendukung jalan status yang lebih tinggi (jalan Nasional / Provinsi)
- Menunjang daerah potensial (Pelabuhan, Industri, Pertanian dan Pariwisata)
- Membuka daerah perbatasan dan terisolir

DATA PENDUKUNG DAK TA. 2017
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
SUBBIDANG AIR MINUM



No.	JENIS DATA	VOL	SAT	KETERANGAN
1.	Jumlah penduduk desa/kelurahan berpenghasilan rendah/MBR	...	Rumah Tangga	Merupakan jumlah rumah tangga/penduduk miskin di kabupaten/kota yang bersangkutan
2.	Cakupan penduduk yang belum mendapat pelayanan air minum	...	Rumah Tangga	Merupakan jumlah penduduk yang belum terfasilitasi sistem penyediaan air minum (belum memiliki akses air minum aman) pada kabupaten/kota yang bersangkutan
3.	Kapasitas belum termanfaatkan / <i>idle capacity</i> dari SPAM IKK dan PDAM	...	Liter/detik	Merupakan selisih antara total kapasitas yang mampu dihasilkan oleh SPAM IKK/PDAM terbangun terhadap kapasitas yang dimanfaatkan oleh masyarakat/pelanggan
4.	Kinerja Pelaporan	...	%	Merupakan nilai kinerja pelaksanaan DAK Bidang Air Minum tahun 2015-2016 pada kabupaten/kota yang bersangkutan
6.	Indeks Kinerja Sambungan Rumah (SR)	...	SR	Merupakan realisasi SR terbangun berdasarkan rencana/target SR pada usulan rencana kegiatan (URK) DAK Bidang Air Minum tahun 2014-2015

DATA PENDUKUNG DAK TA. 2017

PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

SUBBIDANG SANITASI



NO.	JENIS DATA	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN		
1	Cakupan pelayanan sanitasi (Tahun 2015)		%	Merupakan persentase jumlah rumah tangga yang belum terfasilitasi sarana dan prasarana sanitasi di kab/kota yang bersangkutan		
			KK			
			Jiwa			
2	Detail cakupan pelayanan sanitasi Kabupaten/Kota					
Air Limbah	Akses Layak (KK)	SPAL Setempat	Tangki Septik Individual	Unit	Jumlah total Infrastruktur	
			Tangki Septik Komunal (≤ 10 KK)	KK	Jumlah total KK terlayani infrastruktur	
			MCK	Unit	Jumlah total Infrastruktur	
				KK	Jumlah total KK terlayani infrastruktur	
			SPAL Terpusat	Tangki Septik Komunal (> 10 KK)	Unit	Jumlah total Infrastruktur
				IPAL Komunal	KK	Jumlah total KK terlayani infrastruktur
		Unit			Jumlah total Infrastruktur	
		IPAL Kawasan		KK	Jumlah total KK terlayani infrastruktur	
			Unit	Jumlah total Infrastruktur		
		IPAL Kota	KK	Jumlah total KK terlayani infrastruktur		
			Unit	Jumlah total Infrastruktur		
			KK	Jumlah total KK terlayani infrastruktur		
	Unit		Jumlah total Infrastruktur			
	Akses Dasar (KK)	Tangki Septik Individual Belum Aman	Unit	Jumlah total Infrastruktur		
			KK	Jumlah total KK terlayani infrastruktur		
		Cubluk	Unit	Jumlah total Infrastruktur		
KK			Jumlah total KK terlayani infrastruktur			
Lainnya	Buang Air Besar Sembarangan		KK	Jumlah total KK		

DATA PENDUKUNG DAK TA. 2017
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
SUBBIDANG SANITASI



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO.	JENIS DATA		VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
	Persampahan	Timbunan Sampah	Sampah Dikelola Mandiri di Sumber	m ³ /Hari	Volume sampah per hari
				%	Prosentase terhadap total timbunan sampah
			Sampah Terproses 3R	Unit	Jumlah total Infrastruktur TPS 3R
				m ³ /Hari	Volume sampah per hari
				%	Prosentase terhadap total timbunan sampah
			Sampah Terangkut ke TPA	m ³ /Hari	Volume sampah per hari
	%	Prosentase terhadap total timbunan sampah			
	Sarana Khusus untuk Persampahan	Sampah Tidak Terproses	m ³ /Hari	Volume sampah per hari	
			%	Prosentase terhadap total timbunan sampah	
		Truk Sampah	Unit	Jumlah Unit	
Drainase	Wilayah Genangan	Alat Berat Bulldozer	Unit	Jumlah Unit	
		Alat Berat Excavator	Unit	Jumlah Unit	
			Ha	Luas Hektare tergenang	
			%	Prosentase wilayah tergenang terhadap luas wilayah Kabupaten/Kota	
3	Kesiapan program investasi, yang dilihat dari				
	a) Strategi Sanitasi Kota (SSK)/ Memorandum Program Sanitasi (MPS)		Ya/ Tidak		Merupakan dokumen rencana dalam pembangunan sektor sanitasi
	c) Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)		Ya/ Tidak		Merupakan dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah yang dikeluarkan oleh kepala daerah
4	Kinerja Pelaporan DAK Subbidang Infrastruktur Sanitasi			%	Merupakan nilai kinerja pelaksanaan DAK subbidang infrastruktur sanitasi TA 2015 pada kab/kota yang bersangkutan

DATA PENDUKUNG DAK TA. 2017

PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

SUBBIDANG PERUMAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No.	JENIS DATA	VOL	SAT	KETERANGAN
1.	Memiliki unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang perumahan serendah-rendahnya setingkat Eselon III.	Ya / Tidak		Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang Membidangi Perumahan
2.	Mempunyai program/kegiatan sejenis yang bersumber dari APBD	Ya / Tidak		Merupakan program/Kegiatan replikasi Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya bersumber dari APBD
3.	Jumlah Rumah yang ada	...	Unit	Merupakan Jumlah Rumah yang ada di Kab/Kota yang bersangkutan
4.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	...	Unit	Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas dan kesehatan bangunan
5.	Termasuk dalam Program Penanganan Kawasan Kumuh	Ya / Tidak		SK Bupati/Walikota tentang penetapan kawasan kumuh
6.	Penanganan tuntas secara sistematis desa/kelurahan atau kecamatan.	Ya / Tidak		Penanganan tuntas secara sistematis desa/kelurahan atau kecamatan.
7.	Kinerja pelaporan tahun sebelumnya	Ya / Tidak		Kepatuhan terhadap penyampaian laporan triwulanan baik secara manual maupun secara E-Monitoring
8.	Termasuk daerah tertinggal, dan/atau kawasan perbatasan, dan/atau pulau-pulau kecil terluar.	Ya / Tidak		<ul style="list-style-type: none"> - Daerah Tertinggal adalah lokasi kabupaten/kota yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal; - Kawasan Perbatasan, diprioritaskan pada lokasi yang tercantum pada Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara yang ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Pulau-pulau kecil terluar adalah kabupaten/kota ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.